

BAB III

PERJALANAN ISTITUSIONAL SGAA KAUMAN PADANG PANJANG DI TENGAH PERGOLAKAN DAERAH

A. Sejarah Berdirinya SGAA (Sekolah Guru Agama Atas)

1. Masuknya Muhammadiyah ke Padang Panjang

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai komunitas yang memiliki tradisi keislaman yang kuat serta budaya intelektual yang berkembang melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti *surau*. Selain itu, tradisi *merantau* yang mengakar dalam kehidupan sosial Minangkabau turut mendorong tingginya mobilitas intelektual dan pertukaran gagasan dengan berbagai pusat pendidikan Islam, baik di Pulau Jawa maupun di Timur Tengah.¹ Kondisi ini menjadikan Minangkabau sebagai wilayah yang relatif terbuka terhadap ide-ide pembaruan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pemikiran keagamaan.

Dalam konteks tersebut, gerakan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912 menemukan ruang yang subur untuk berkembang di Minangkabau. Sejak awal, Muhammadiyah memiliki orientasi pada pembaruan pendidikan Islam dan perbaikan sosial melalui kegiatan amal usaha. Gagasan-gagasan pembaruan yang dibawa Muhammadiyah dengan cepat menembus batas geografis Pulau Jawa, salah satunya melalui jaringan ulama,

¹ Zainul Wahab, "Dakwah Dan Pratikum Moderasi Beeragama Di Minangkabau: Seebuah Kajian Sosial Budaya," *Al-Qolam: Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 1–13.

murid, dan pedagang Minangkabau yang memiliki mobilitas tinggi. Hubungan intelektual ini mempercepat masuknya pengaruh Muhammadiyah ke Sumatera Barat, termasuk ke Padang Panjang yang pada masa itu telah dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam modern.²

Menurut catatan sejarah, cabang Muhammadiyah di Minangkabau mulai berdiri sejak awal 1920-an. A.R. Sutan Mansur, tokoh asal Maninjau yang menuntut ilmu di Yogyakarta dan kemudian dekat dengan Ahmad Dahlan, memiliki peranan besar dalam memperkenalkan Muhammadiyah ke Minangkabau. Ia membawa pulang gagasan pembaharuan yang menekankan pentingnya pendidikan modern, penghapusan praktik *takhayul*, *bid'ah*, dan *churafat*, serta perlunya organisasi Islam yang rapi. Kehadiran A.R. Sutan Mansur menjadi figur kunci karena selain berwawasan luas, ia juga memiliki jaringan sosial yang kuat di Minangkabau. Dari sinilah Muhammadiyah mulai menancapkan pengaruhnya di berbagai daerah.³

Dalam konteks Minangkabau, gagasan Muhammadiyah diterima karena adanya tradisi intelektual Islam yang sudah mapan. Ulama-ulama Minangkabau sejak abad ke-19 dikenal memiliki hubungan erat dengan Mekah, di antaranya Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, yang menjadi guru banyak ulama muda seperti Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), Zainuddin Labay El-Yunusy, dan lainnya. Ketika mereka pulang ke kampung halaman, mereka membawa semangat pembaruan, terutama dalam bidang pendidikan: dari sistem surau tradisional

² Moh. Naimuddin, "Model Penelitian Pemikiran Islam Modern 'Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900 – 1942' (Deliar Noer)," *Saintifika Islamica* 1, no. 2 (2014): 87–96.

³ HAMKA, *Ayahku*, 5 Cetakan (Depok: Gema Insani, 1950).

menuju madrasah modern. Lahirnya Sumatera Thawalib dan Diniyyah School di Padang Panjang pada awal abad XX menjadi bukti bagaimana gagasan reformasi pendidikan berkembang pesat di kawasan.⁴

Namun, Muhammadiyah bukan sekadar gerakan pendidikan, melainkan juga organisasi yang memiliki sistem administrasi modern dan mampu menggerakkan amal usaha secara kolektif. Hal inilah yang membedakan Muhammadiyah dengan gerakan reformis sebelumnya di Minangkabau. Jika Sumatera Thawalib berorientasi pada pendidikan intelektual, dan Diniyyah School lebih menekankan pembelajaran bagi perempuan, Muhammadiyah hadir dengan paket lengkap: pendidikan, dakwah, sosial, dan kesehatan dalam satu wadah organisasi. Karena itu, meskipun awalnya ada resistensi dari kelompok kaum tua, Muhammadiyah relatif cepat diterima, terutama oleh kalangan kaum muda yang haus akan organisasi Islam modern.⁵

Sejak akhir 1920-an, Muhammadiyah di Padang Panjang menjadi cabang yang paling aktif di Sumatra Barat. Hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan dari cabang-cabang Muhammadiyah di luar daerah. Menurut laporan *Suara Muhammadiyah*, pada awal 1929, Muhammadiyah Cabang Padang Panjang menerima desakan dari berbagai daerah seperti Aceh, Tapanuli, Sumatra Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Mukomuko, hingga Lampung untuk mengirim tenaga guru,

⁴ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, n.d.).

⁵ Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior Of a Muslim Modernist Organization Under Ducth Colonialism* (Bandung: Gadjah Mada University Press, 1989): 13.

tenaga administrasi, dan pimpinan yang berpengalaman. Mereka kekurangan sumber daya manusia yang mampu mengelola sekolah Muhammadiyah, rumah yatim, dan aktivitas dakwah. Permintaan ini menunjukkan bahwa Cabang Padang Panjang telah menempati posisi strategis sebagai pusat kaderisasi dan pengiriman tenaga terlatih Muhammadiyah di Sumatra dan sekitarnya.⁶

Desakan kebutuhan kader inilah yang kemudian mendorong lahirnya gagasan untuk mendirikan sekolah khusus pengkaderan pimpinan Muhammadiyah. A.R. Sutan Mansur merespons permintaan tersebut dengan langkah nyata: menggagas pendirian sebuah lembaga pendidikan khusus yang dinamakan Tabligh School pada 1928. Tujuannya jelas, yakni mencetak mubaligh dan pimpinan organisasi yang tidak hanya paham agama, tetapi juga memiliki keterampilan manajerial serta kemampuan berdakwah.⁷

Lahirnya gagasan pendirian Tabligh School ini semakin menegaskan bahwa masuknya Muhammadiyah ke Minangkabau bukanlah sekadar ekspansi organisasi, melainkan bagian dari upaya restrukturisasi pendidikan Islam modern di kawasan tersebut. Dengan adanya Muhammadiyah, sistem pendidikan Islam di Minangkabau bergerak dari basis surau tradisional, kemudian madrasah swasta seperti Thawalib dan Diniyyah, hingga ke arah sekolah kader dakwah yang

⁶ Fikrul Hanif Sufyan, “Kisah Balik Diresmikannya Muhammadiyah Cabang Padang Panjang Tahun 1926,” suara muhammadiyah2, 2022, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2022/07/01/kisah-dibalik-diresmikannya-muhammadiyah-cabang-padang-panjang-tahun-1926/>.

⁷ Hanif, *Kulliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

terorganisir. Tabligh School menjadi puncak dari perjalanan awal ini, sekaligus menandai babak baru dalam sejarah pendidikan Islam modern di Padang Panjang.

2. Pendirian Tabligh School

Dorongan untuk mendirikan Tabligh School di Padang Panjang tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari situasi sosial-keagamaan dan kebutuhan organisasi Muhammadiyah pada dekade 1920-an. Pada masa itu, Muhammadiyah yang telah berkembang di berbagai daerah di luar Jawa menghadapi persoalan serius: kekurangan kader terlatih. Banyak cabang baru berdiri di Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatra Timur, hingga Sulawesi Selatan, tetapi mereka kesulitan mencari tenaga pengajar, administrator, dan pimpinan yang mampu menggerakkan organisasi sesuai dengan semangat modern Muhammadiyah.⁸

Cabang Muhammadiyah Padang Panjang menempati posisi penting dalam jaringan ini. Kota kecil di lereng Gunung Marapi itu sejak awal abad XX sudah dikenal sebagai pusat pembaruan Islam di Sumatra Barat. Kehadiran sekolah-sekolah seperti Sumatera Thawalib dan Diniyyah School menjadikan Padang Panjang sebagai kotaa pendidikan dan dakwah.⁹ Maka, wajar jika Muhammadiyah pusat maupun cabang-cabang luar daerah menaruh harapan besar pada Padang Panjang untuk melahirkan kader baru.

⁸ Derliana, *Melintasi Lorong Waktu*, Cetakan 1 (Jawa Timur: Fam Publishing, 2016): 14-19.

⁹ Sufyan, "Kisah Balik Diresmikannya Muhammadiyah Cabang Padang Panjang Tahun 1926."

A.R. Sutan Mansur sebagai salah seorang ulama modernis Minangkabau yang dekat dengan K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, ia membawa semangat organisasi Muhammadiyah ke Sumatra Barat. Pada awal 1928, ia melihat semakin mendesaknya kebutuhan sekolah kader yang mampu menyiapkan tenaga mubaligh dan pemimpin Muhammadiyah. Usulan itu ia sampaikan kepada pengurus Cabang Muhammadiyah Padang Panjang, dan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia persiapan. Dalam struktur panitia itu tercatat nama-nama tokoh penting seperti Saalah Jusuf Sutan Mangkuto sebagai *voorzitter* (ketua), Datuk Sati sebagai wakil, A. Wahid R sebagai sekretaris, serta dukungan moral dari ulama besar Haji Abdul Karim Amrullah.¹⁰

Pemilihan tokoh-tokoh tersebut tidak terlepas dari posisi strategis mereka. Haji Rasul dikenal sebagai ulama reformis terkemuka yang memiliki wibawa keilmuan, sementara Saalah Jusuf dan Datuk Sati mewakili generasi muda Muhammadiyah di Padang Panjang yang energik. Dukungan mereka menandakan bahwa pendirian Tabligh School merupakan hasil konsensus antara ulama senior dan aktivis muda. Setelah struktur panitia terbentuk, langkah berikutnya adalah menentukan siapa yang layak menjadi direktur sekolah baru itu. Pilihan akhirnya jatuh kepada Haji Abdul Malik Karim Amrullah, keponakan Haji Rasul sekaligus adik ipar A.R. Sutan Mansur. Penunjukan Haki Abdul Karim Malik Amrullah memperlihatkan bahwa Muhammadiyah Padang Panjang tidak hanya

¹⁰ Hanif, *Kulliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

mengandalkan tokoh senior, tetapi juga memberi kepercayaan pada kader muda yang penuh potensi.¹¹

Gagasan mendirikan sekolah ini segera mendapat perhatian media. Harian Belanda *De Locomotief* pada 2 April 1928 memberitakan bahwa Muhammadiyah Padang Panjang akan meresmikan sebuah “Tabligh School” yang diproyeksikan menjadi sekolah khusus bagi propagandis Islam.¹² Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa kurikulum sekolah mencakup kursus pengkaderan kepemimpinan organisasi, pemahaman Islam, serta latihan dakwah yang berlangsung selama dua tahun. Bahkan, sekolah ini dilengkapi dengan internaat (asrama), yang bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang disiplin, sistematis, dan modern. Dengan demikian, Tabligh School sejak awal memang diposisikan sebagai lembaga kaderisasi, bukan sekadar madrasah keagamaan.

Pada Kamis, 14 Syawal 1346 H atau 5 April 1928, secara resmi Tabligh School Muhammadiyah dibuka di eks Hotel Merapi, Onderafdeling Batipuh X Koto.¹³ Pemilihan gedung bekas hotel sebagai lokasi sekolah memiliki makna simbolis: Muhammadiyah ingin menunjukkan bahwa pendidikan Islam modern mampu memanfaatkan sarana-sarana baru di luar tradisi lama surau. Gedung permanen dengan fasilitas asrama memperlihatkan bahwa Muhammadiyah tidak

¹¹ Pejuang, “Lebih Dekat Bersama Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, Ulama Terkemuka Dan Pendiri Sekolah Islam Modern Pertama,” *MBS Yogyakarta*, 2021.

¹² Hanif, *Kulliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

¹³ “HIS Muhammadiyah Padang Panjang 1927” (Yogyakarta, n.d.), <https://sejarahmu.umy.ac.id/h-i-s-muhammadiyah-padang-panjang-1927/>.

sekadar mengajar ilmu agama, tetapi juga menyiapkan kader dengan disiplin dan tata kelola modern.



Jika ditarik dalam konteks yang lebih luas, pendirian Tabligh School adalah kelanjutan dari tradisi pembaruan pendidikan Islam di Minangkabau. Sebelumnya, Sumatera Thawalib menekankan pendidikan berbasis kitab-kitab klasik dengan sistem kelas modern, sementara Diniyyah School Putri (1923) yang didirikan Rahmah El Yunusiyah membuka akses pendidikan bagi perempuan. Tabligh School melengkapi mosaik ini dengan fokus pada kaderisasi dakwah dan kepemimpinan Muhammadiyah. Jadi, ia tidak hanya melanjutkan semangat pembaruan, tetapi juga mengisi ruang yang belum digarap oleh lembaga pendidikan Islam lainnya.

Pada masa awal berdirinya, Tabligh School sesungguhnya belum memiliki kurikulum formal yang terstruktur sebagaimana lembaga pendidikan modern. Orientasi utamanya lebih menekankan pada proses kaderisasi dan latihan dakwah. Sesuai dengan namanya, sekolah ini memang diarahkan untuk melahirkan mubaligh Muhammadiyah yang terlatih, sehingga pendekatan pembelajaran yang dipakai berfokus pada praktik. Murid-murid tidak hanya menerima teori, melainkan langsung dilibatkan dalam pelatihan kepemimpinan dan retorika. Salah satu bentuk pembelajaran yang menonjol adalah kegiatan taruna melati, sebuah latihan kader Muhammadiyah yang berfungsi sebagai arena menumbuhkan keberanian tampil di depan umum. Melalui kegiatan ini, murid dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang percaya diri, mampu berbicara lugas, serta terbiasa menghadapi masyarakat. Dengan demikian, Tabligh School dapat dipandang sebagai ruang kaderisasi yang berfungsi sekaligus sebagai laboratorium dakwah, tempat para calon mubaligh berlatih secara langsung sebelum terjun ke lapangan.¹⁴

Kekuatan utama sekolah ini terletak pada figur-figur pengajarnya. Para tenaga pendidik yang mengasuh Tabligh School merupakan tokoh-tokoh penting Muhammadiyah dan ulama modernis Sumatra Barat. Di antaranya ialah Haji Abdul Karim Amrullah, Ahmad Rasyid Sutan Mansur, Saalah Yusuf Mangkuto, Datuk Sati, A. Wahid, Sultan Saidi, Haji Yusuf Amrullah, Yusuf M. Nur Amrullah, dan Karim Datuk Rangkayo Marajo. Kehadiran tokoh-tokoh tersebut memberi bobot akademik sekaligus wibawa moral yang kuat bagi sekolah. Bahkan, sejak tahun

¹⁴ Derliana, *Melintasi Lorong Waktu*.

1930 hingga 1936, pimpinan sekolah dipercayakan kepada Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Meskipun masih muda beliau sudah menampakkan kapasitas intelektual dan karismanya sebagai orator yang ulung dan penulis yang produktif. Di bawah kepemimpinannya, Tabligh School memperoleh corak yang khas, yakni memadukan semangat pembaruan Muhammadiyah dengan kecakapan praktis untuk menggerakkan organisasi.¹⁵

Adapun peserta didik pada masa awal jumlahnya relatif sedikit. Catatan menunjukkan bahwa pada tahun 1931 baru terdapat 16 murid yang terdaftar.¹⁶ Namun, jumlah yang terbatas itu justru memperlihatkan sifat kaderisasi yang selektif. Murid-murid umumnya datang dari latar belakang pendidikan madrasah atau sekolah Islam modern, sehingga sudah memiliki bekal ilmu agama dasar. Kehadiran asrama sebagai bagian dari fasilitas sekolah juga memperkaya proses pendidikan. Dengan sistem ini, murid tidak hanya belajar di kelas, melainkan juga dibentuk melalui kehidupan bersama sehari-hari yang menekankan kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab. Asrama pada akhirnya menciptakan atmosfer pembinaan yang intensif, yang memungkinkan hubungan erat antara guru dan murid serta memperkuat ikatan solidaritas di antara para siswa.

¹⁵ Hanif, *Kulliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

¹⁶ Kulliyatul Mubalighin, "Buku-Baku (Stamboek) Sekolah Muhammadiyah" (Padang Panjang, 1931).

BUKU - BAKU (Stamboek)												SEKOLAH MUHAMMADIYAH											
M U R I D												M U R I D											
SANG MENANGUNG URUSAN SEKOLAH												M U R I D											
No. Urut	Tempat dan tanggal lahir	NAMA	Tempat dan tanggal lahir	Agama	Pendidikan	Alamat	Tempat dan tanggal lahir	NAMA	Tempat dan tanggal lahir	Agama	Pendidikan	No. Urut	Tempat dan tanggal lahir	NAMA	Tempat dan tanggal lahir	Agama	Pendidikan	Alamat	Tempat dan tanggal lahir	NAMA	Tempat dan tanggal lahir	Agama	Pendidikan
001.		A. Malik Ahmad	Syamsudin, A. Ahmad																				
002.		Saleh J.																					
003.		Saidin H.																					
004.		Jarub H.																					
005.		Djamaris																					
006.		Djamaris																					
007.		Samsudin																					
008.		Rachman																					

Gambar 2 Buku-Buku (Stamboek) Sekolah Muhammadiyah Sumber: Arsip Kulliyatul Muballighien

Dengan kurikulum yang sederhana, tenaga pendidik yang berwibawa, dan peserta didik yang dipilih dengan ketat, Tabligh School menjadi lembaga kaderisasi yang unik dalam sejarah pendidikan Islam di Minangkabau. Meskipun tidak bertahan lama dalam bentuk awalnya, fondasi yang diletakkan pada masa ini menjadi pijakan penting bagi kelanjutan tradisi pendidikan kader Muhammadiyah di Padang Panjang. Dari sinilah kelak lahir gagasan untuk memperbaharui dan memperkuat sekolah tersebut menjadi Kulliyatul Muballighin pada tahun 1936.¹⁷

3. Masa Perintisan Kulliyatul Muballighien

Memasuki tahun 1932, Tabligh School yang sejak awal digagas sebagai lembaga kaderisasi mubaligh Muhammadiyah di Minangkabau mengalami masa

¹⁷ Hanif, Kulliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia.

suram. Agus Hakim menyebutkan bahwa nonaktifnya Tabligh School yang “berumur sejagung” itu terutama disebabkan oleh kepindahan Hamka ke Makassar untuk mengurus kepentingan persyarikatan atas perintah Hoofdbestuur Muhammadiyah Hindia Timur. Absennya Hamka, yang berperan sentral dalam menggerakkan semangat kader muda dan memberikan warna intelektual pada lembaga, membuat roda organisasi kehilangan figur pemimpin karismatik.¹⁸

Namun, Agus Hakim bukan satu-satunya yang mengulas kemunduran ini. Hasan Ahmad menekankan bahwa faktor eksternal jauh lebih dominan. Menurutnya, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui aparatnya, Politieke Inlichtingen Dienst (PID) dan veldpolitie, secara sistematis melakukan aksi pembungkaman terhadap gerakan Islam yang dianggap mengancam *rust en orde*. Melalui tuduhan *persdelict* (pelanggaran pers), pemerintah berusaha membatasi ruang gerak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang vokal. Gubernur Jenderal Limburg Stirum bahkan menggunakan hak istimewanya, *exorbitant rechten*, untuk menghantam organisasi pergerakan yang dinilai merongrong kewibawaan kolonial. Dalam konteks ini, Tabligh School menjadi korban represi politik, karena lembaga pendidikan tersebut dianggap bisa melahirkan kader militan yang berpotensi memperkuat gerakan Islam modernis.¹⁹

Di samping faktor politik, kondisi ekonomi global juga sangat berpengaruh. Menurut catatan Wilde dan Moll, masa malaise ekonomi atau depresi besar yang melanda Hindia Belanda sejak awal 1930-an menyebabkan berbagai sektor

¹⁸ Derliana, *Melintasi Lorong Waktu*.

¹⁹ Hanif, *Kulliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

ekonomi runtuh. Salah satu yang paling terpukul adalah industri gula, produksi yang tinggi pada 1930–1931 tidak diimbangi dengan harga yang stabil, sehingga pemerintah Belanda harus menyetujui perjanjian internasional Chadbourne Agreement untuk membatasi produksi. Akibatnya, banyak pabrik gula terpaksa ditutup; pada tahun 1933 hampir separuh pabrik gula di Indonesia tidak lagi beroperasi. Gelombang PHK besar-besaran dan hancurnya sendi-sendi ekonomi masyarakat menyebabkan akses pendidikan menjadi sangat terbatas.²⁰ Situasi ini turut berimbas pada Tabligh School, karena sebagian besar muridnya berasal dari keluarga sederhana, bahkan ada yang dari luar Sumatra Barat. Ketidakmampuan finansial keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka membuat animo terhadap lembaga tersebut merosot drastis.

Bila ditarik ke belakang, dapat dikatakan bahwa kemunduran Tabligh School merupakan hasil dari pertemuan tiga faktor utama,

- a. Faktor internal, absennya tokoh sentral (Hamka) yang menjadi penggerak.
- b. Faktor politik, represi sistematis pemerintah kolonial terhadap gerakan Islam modernis melalui Politieke Inlichtingen Dienst (PID), veldpolitie, dan beleid hukum kolonial.

²⁰ Agnes Petrus, “Pengaruh Industri Gula Masa Krisis Malaise Terhadap Masyarakat Di Karesidenan Jepara Tahun 1930 – 1940,” *MOZAIK Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 12, no. 2 (2022): 132–48.

- c. Faktor ekonomi, depresi besar yang menurunkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan dan menurunkan minat calon kader dari luar daerah.

Maka, runtuhnya Tabligh School pada tahun-tahun awal 1930-an tidak bisa dilihat sebagai kegagalan ide semata, melainkan sebagai konsekuensi logis dari kondisi sosial-politik dan ekonomi yang melingkupinya. Justru, pengalaman pahit ini kelak menjadi pelajaran penting bagi Muhammadiyah Sumatra Barat untuk merumuskan kembali strategi pendidikan kader dakwah.

Dampak depresi ekonomi dunia yang melanda Hindia-Belanda sejak 1930-an juga memperburuk keadaan. Banyak sekolah Islam modernis kesulitan mempertahankan diri karena berkurangnya dukungan finansial masyarakat. Namun, krisis itu sekaligus memperlihatkan pentingnya keberadaan sekolah kader. Muhammadiyah sadar, jika ingin bertahan menghadapi tekanan ekonomi dan represi pemerintah kolonial, mereka membutuhkan pemimpin-pemimpin muda yang tangguh, cakap berdakwah, dan mampu mengorganisir jamaah, Inilah latar sosial-ekonomi yang mendorong lahirnya gagasan menghidupkan kembali Tabligh School.²¹

Dalam Konferensi ke-11 Muhammadiyah Minangkabau di Maninjau tahun 1935, tercapai kesepakatan untuk menghidupkan kembali Tabligh School. Namun, para peserta konferensi sadar bahwa nama lama itu sudah melekat pada pengalaman

²¹ Soegijanto Padmo, "Depresi 1930-an dan Dampaknya Terhadap Hindia Belanda Soegijanto Padmo," 1991, 151.

kegagalan. Maka diputuskan untuk mengganti namanya menjadi Kuliyatul Mubalighin.²² Pergantian nama ini bukan sekadar kosmetik, melainkan sebuah pernyataan ideologis, sekolah ini benar-benar ditujukan untuk mencetak para mubaligh kader dakwah Muhammadiyah yang siap mengabdikan diri untuk umat dan bangsa.

Pasca konferensi, Muhammadiyah Cabang Padang Panjang segera menyebarkan maklumat dan iklan penerimaan siswa ke berbagai sekolah Islam, seperti Sumatra Thawalib, Diniyah School, Madrasah Irsyadunnas, hingga sekolah-sekolah pemerintah. Sambutan masyarakat cukup besar. Murid-murid datang tidak hanya dari Padang Panjang, tetapi juga dari berbagai wilayah lain di Sumatra. Hal ini membuktikan bahwa meskipun Muhammadiyah sempat mengalami kemunduran, reputasi Padang Panjang sebagai pusat pendidikan Islam modern masih kuat di mata masyarakat luas.

Pada 2 Februari 1936, Kuliyatul Mubalighin resmi dibuka di Kauman, Padang Panjang. Struktur kepemimpinan sekolah segera dibentuk, Jacob Rasjid ditunjuk sebagai direktur, sementara Rasjid Idris Dt. Sinaro Panjang dipercaya sebagai administrator. Keputusan ini menunjukkan keseimbangan antara kapasitas intelektual dan pengalaman organisasi, sebab keduanya dikenal sebagai tokoh muda Muhammadiyah yang berkomitmen penuh pada pendidikan.²³

²² Sulaeman, "Tradisi Dan Konsensus Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Padang Panjang Tahun 1955 1985" (Universitas Indonesia, 2025).

²³ Hanif, *Kuliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

Namun, Kuliyatul Mubalighin sejak awal menghadapi tantangan berat. Di satu sisi, ia harus bersaing dengan sekolah Islam modern lain yang lebih dahulu populer. Di sisi lain, ia memikul tanggung jawab besar sebagai pusat kaderisasi dakwah Muhammadiyah di Sumatra Barat. Untuk menjawab tantangan tersebut, kurikulum Kuliyatul Mubalighin dirancang lebih luas dibanding Tabligh School. Selain pelajaran agama dan dakwah, murid juga diajarkan pengetahuan umum, bahasa asing (Belanda dan Inggris), serta keterampilan kepemimpinan. Perpaduan antara ilmu agama, ilmu umum, dan keterampilan praktis inilah yang menjadikan sekolah ini unik.

Sejak awal, sekolah ini ditetapkan sebagai setingkat sekolah menengah atas. Kurikulumnya diperluas, memasukkan pelajaran agama secara lebih mendalam khususnya fiqh dan hadis serta memperkenalkan bahasa asing seperti Belanda dan Inggris agar murid-murid memiliki wawasan yang lebih luas. Meski begitu, pelajaran umum yang sejak awal menjadi ciri khas Muhammadiyah tetap dipertahankan. Dengan demikian, Kuliyatul Mubalighin tampil sebagai lembaga pendidikan kader dakwah yang berusaha menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, sebuah model yang jarang ditemui di sekolah Islam lain pada masa itu.²⁴

Menurut penjelasan Derliana selaku mudir istilah Kuliyatul Mubalighin memiliki makna filosofis yang dalam. Kata kuliyatul berarti “tempat bersemayam” atau “wadah”, sementara mubaligh berarti “orang-orang yang menyebarkan dakwah”. Maka, Kuliyatul Mubalighin dapat dipahami sebagai sebuah wadah

²⁴ Azizah, “Dinamika Madrasah Aliyah Kuliyatul Muballighien Muhammadiyah Padang Panjang (Tinjauan Historis 1930-2018).”

tempat para calon mubaligh menuntut ilmu sebelum turun langsung ke tengah masyarakat. Makna simbolis ini mempertegas tujuan utama pendirian sekolah: mencetak kader mubaligh Muhammadiyah yang berilmu, berakhlak, dan siap mengabdikan.²⁵

Pada masa awal, kepemimpinan sekolah masih berada di bawah Buya HAMKA, tokoh karismatik yang sejak awal terlibat dalam gagasan pendirian Tabligh School. Namun, aktivitas HAMKA yang padat terutama perjalanannya ke Makassar, Palembang, dan Medan membuat ia sering absen dari Padang Panjang. Pada 1936, ia bahkan hijrah ke Medan untuk memimpin majalah Pedoman Masyarakat, salah satu media Islam modernis paling berpengaruh kala itu. Kepergian HAMKA menimbulkan kekecewaan di kalangan murid, terutama mereka yang datang dari jauh untuk menimba ilmu darinya. Akan tetapi, HAMKA tidak benar-benar terputus dari Kuliyatul Mubalighin. Hubungan emosional dan intelektual tetap ia jaga, sementara roda sekolah dilanjutkan oleh al-Ustaz Ya'kub Rasyid, yang dipercaya sebagai pengganti.

Di bawah kepemimpinan Ya'kub Rasyid, Kuliyatul Mubalighin mulai menata diri lebih serius. Tenaga pengajar bertambah dengan hadirnya Harun L. Ma'any dan H. Badaruddin Zen dari Pariangan. Kehadiran mereka menambah bobot akademis sekolah, karena masing-masing dikenal sebagai ulama muda dengan kapasitas keilmuan yang kuat. Dalam suasana Minangkabau yang sedang

²⁵ Derliana, "Makna Kuliyatul Mubalighin, Wawancara Tanggal 14-10-2025" (Padang Panjang, 2025).

bergeliat dengan pendidikan modernis, langkah ini sekaligus mempertegas posisi Kuliyatul Mubalighin sebagai pusat kaderisasi Muhammadiyah.

Dari sisi peserta didik, perkembangan sekolah ini terlihat cukup menjanjikan. Pada tahun 1937, Kuliyatul Mubalighin berhasil meluluskan 14 orang murid angkatan pertama. Setahun kemudian, jumlah lulusan memang menurun menjadi 12 orang, tetapi segera melonjak pada tahun-tahun berikutnya: 29 orang (1939), 44 orang (1940), dan meskipun kembali menurun pada 1941 (27 orang), angka tersebut tetap menunjukkan adanya dinamika pertumbuhan. Pada tahun 1942, menjelang pendudukan Jepang, tercatat masih ada 23 lulusan.²⁶ Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meski menghadapi berbagai kendala politik dan ekonomi, sekolah tetap berfungsi sebagai lembaga pencetak kader dakwah.

Perjalanan Kuliyatul Mubalighin pada masa perintisan ini sesungguhnya menegaskan ketangguhan Muhammadiyah Minangkabau. Dengan segala keterbatasan gedung sederhana, tenaga pengajar terbatas, dan kondisi sosial-politik yang tidak stabil lembaga ini tetap mampu bertahan dan menghasilkan lulusan yang kelak menjadi tokoh penting di masyarakat. Bahkan, pada masa-masa sulit menjelang kedatangan Jepang, Kuliyatul Mubalighin masih menunjukkan vitalitasnya sebagai pusat pendidikan Islam modernis. Dari sini jelas terlihat bahwa pendirian Kuliyatul Mubalighin pada 1936 bukanlah sekadar “menghidupkan

²⁶ Azizah, “Dinamika Madrasah Aliyah Kuliyatul Muballighien Muhammadiyah Padang Panjang (Tinjauan Historis 1930-2018): 33-41.”

kembali” Tabligh School, melainkan benar-benar membangun fondasi baru bagi kaderisasi dakwah Muhammadiyah di Sumatra Barat.

4. Kuliyatul Muballighien di Masa Kependudukan Jepang

Masuknya tentara Dai Nippon ke Sumatra Barat pada awal Februari 1942 menandai babak baru yang penuh ketidakpastian bagi masyarakat Minangkabau, termasuk dunia pendidikan. Hanya dalam waktu empat hari, hampir semua kota penting di wilayah ini jatuh ke tangan Jepang tanpa perlawanan berarti dari Belanda. Sisa-sisa pasukan kolonial memang mencoba bertahan di pedalaman, tetapi gempuran militer Jepang terlalu kuat. Padang Panjang, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam modernis, ikut merasakan atmosfer mencekam akibat perubahan rezim yang berlangsung begitu cepat.²⁷

Bagi Kuliyatul Muballighin, situasi perang segera memberikan dampak langsung. Banyak murid yang berasal dari daerah sentra perkebunan karet memilih meninggalkan bangku sekolah, bukan hanya karena alasan keamanan, tetapi juga akibat anjloknya harga getah yang melemahkan kondisi ekonomi keluarga mereka. Puncaknya, pada 15 Februari 1942, sekolah yang bernaung di Kauman, Padang Panjang, resmi ditutup sementara. Sehari sebelum penutupan itu, langit Padang Panjang hampir setiap jam dipenuhi pesawat pembom Dai Nippon. Sesekali, dentuman bom terdengar dari kejauhan, menegaskan kehadiran penguasa baru di Sumatra Barat.²⁸

²⁷ Taufik Resamaili, “Kota Bukit Tinggi Pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)” (Universitas Indonesia, 2007): 9-10.

²⁸ Hanif, *Kuliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

Dalam suasana mencekam tersebut, murid-murid Tsanawiyah, Muallimin, dan Kuliyatul Mubalighin yang masih bertahan di sekitar Padang Panjang sibuk menggali lubang perlindungan, sesuai instruksi kepala nagari setempat. Lubang itu menjadi tempat persembunyian sewaktu-waktu bila pesawat pengebom melintas. Akhir Februari 1942, wilayah Onderafdeling Batipuh X Koto nyaris lengang. Banyak keluarga memilih kembali ke kampung masing-masing, sementara hanya segelintir orang yang bertahan membuka kedai atau tetap bermukim di rumah. Guru Kuliyatul Mubalighin, Kasim Bakri, yang berdomisili di Batipuh, sempat berupaya mempertahankan kegiatan belajar-mengajar. Namun, aktivitas itu hanya berlangsung beberapahari, karena setiap kali suara pesawat tempur terdengar, ia terpaksa meliburkan murid-muridnya.²⁹

Secara resmi, pasukan Jepang memasuki Kota Padang pada 13 Maret 1942. Awalnya, kedatangan mereka menimbulkan kepanikan, sebagaimana yang dirasakan orang-orang Belanda. Akan tetapi, lewat propaganda Gerakan 3A (“Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia”), Jepang berhasil membalikkan situasi. Rakyat, termasuk masyarakat Minangkabau, menyambut mereka dengan harapan baru, meskipun di balikny tersimpan agenda militeristik yang keras.³⁰

Dua tahun pertama, pemerintah Dai Nippon tampak berhasil menguasai keadaan. Namun, memasuki 1943, ketika Perang Asia Pasifik kian menekan, Jepang mulai kesulitan mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga manusia.

²⁹ Hanif, *Kuliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang Untuk Indonesia*.

³⁰ Fetra Yurita et al., “As the Protection of Allied 1942-1945 in Bukittinggi,” 1945, 1–11.

Untuk menutupi kelemahan itu, mereka segera mengorganisir pemuda dalam barisan semi-militer. Lembaga-lembaga seperti Seinendan, Keibodan, dan Fujinkai dibentuk untuk melatih kedisiplinan, keterampilan baris-berbaris, serta kesiapan tempur pemuda Indonesia.

Di Padang Panjang, perekrutan untuk Seinendan dipusatkan di Kauman. Puluhan lulusan Tabligh School dan Kuliyatul Muballighien direkrut oleh komandan Bogodan Tyo, Malik Ahmad. Bahkan, salah satu yang direkrut adalah adiknya sendiri, Samsuddin Ahmad.³¹ Perekrutan ini menegaskan betapa kedekatan Kuliyatul Muballighin dengan basis massa pemuda membuat sekolah ini menjadi ladang potensial bagi Jepang untuk mengisi barisan semi-militer mereka.

Selain perekrutan pemuda, Jepang juga berusaha merangkul tokoh-tokoh lokal. Di tingkat pusat, dibentuk Chuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat), di mana A.R. Sutan Mansur tokoh penting Muhammadiyah ditunjuk untuk mewakili Sumatra. Sementara di tingkat daerah, lahir Shu Sangi Kai (Dewan Pertimbangan Karesidenan), yang juga diisi oleh sejumlah tokoh pendidikan Islam, termasuk mereka yang dekat dengan Muhammadiyah.

Meskipun dalam kondisi sulit, penerimaan murid baru Kuliyatul Muballighien relatif stabil sepanjang masa pendudukan Jepang. Data menunjukkan pada tahun 1942 tercatat 13 murid baru, tahun 1943 sebanyak 20 orang, tahun 1944 sejumlah 14 orang, dan tahun 1945 meningkat menjadi 42 orang.³² Angka ini

³¹ Hanif, *Kuliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

³² Muballighin, "Buku-Baku (Stamboek) Sekolah Muhammadiyah."

memang jauh dari capaian sebelum perang, tetapi cukup membuktikan bahwa semangat untuk belajar di sekolah kader Muhammadiyah tidak sepenuhnya padam.

5. Kuliyatul Muballighien Pasca Kemerdekaan

Usai berita proklamasi kemerdekaan tersebar luas pada Agustus 1945, suasana Kauman Padang Panjang dipenuhi rasa gembira. Kemerdekaan yang baru berumur sekejap itu segera membawa dampak nyata bagi Kuliyatul Mubalighien. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka melonjak pesat. Pada akhir Agustus 1945 tercatat masing-masing sekolah menerima sekitar 50 murid baru. Pertambahan jumlah siswa yang cukup signifikan ini memaksa pihak pimpinan untuk menambah ruang kelas meskipun masih bersifat semi permanen.

Pergantian kepemimpinan pun terjadi. Rasjid Idris Dt. Sinaro Panjang yang semula memimpin Kuliyatul Mubalighat digantikan oleh Palizir Hafliil. Sementara posisi Majelis Idarah yang sebelumnya dipegang Malik Ahmad, kemudian beralih kepada Amir Ali. Bersamaan dengan itu, gagasan untuk memperbaiki kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan segera diwujudkan. Pada 23 September 1945, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto memprakarsai pembangunan gedung baru. Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh A.R. Sutan Mansur. Pembangunan dilakukan secara gotong royong, murid laki-laki dikerahkan untuk mengangkut kayu dari hutan Bukit Tambangan sejauh sepuluh kilometer, sementara murid lainnya bertugas mengumpulkan donasi dari para saudagar di daerah mereka masing-masing.³³

³³ Hanif, *Kuliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

Namun, pergolakan politik dan militer pada masa revolusi turut membawa dampak terhadap kegiatan belajar-mengajar. Sejak 1947 hingga 1949, Kuliyatul Mubalighien memasuki masa stagnasi, bahkan hampir vakum. Situasi perang kemerdekaan dan agresi militer Belanda kedua memaksa Harun el-Maany, selaku direktur, memindahkan aktivitas sekolah ke Nagari Sumanik, Tanah Datar. Banyak guru yang sebelumnya aktif mengajar ikut terlibat dalam pemerintahan darurat maupun dalam laskar perjuangan, sehingga kegiatan pendidikan tidak berjalan optimal.³⁴

Meskipun demikian, data jumlah siswa pada masa ini tetap menunjukkan dinamika yang menarik. Pada 1945 terdapat 26 murid, jumlah ini melonjak menjadi 61 murid pada 1946, dan terus meningkat hingga mencapai 116 murid pada 1948. Namun, akibat situasi perang dan Agresi Militer Belanda II tahun 1949, sekolah tidak dapat meluluskan siswa baru. Baru pada 1950 tercatat 93 lulusan yang dihasilkan. Angka-angka ini mencerminkan pasang surutnya Kuliyatul Mubalighien, yang tetap berusaha bertahan di tengah gejolak revolusi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Dengan demikian, perjalanan Kuliyatul Mubalighien pada masa revolusi tidak hanya menggambarkan dinamika sebuah lembaga pendidikan Islam, tetapi juga menegaskan peran ganda yang dijalankannya. Di satu sisi, sekolah ini berusaha mempertahankan fungsinya sebagai pusat pembinaan kader mubaligh melalui pengajaran agama dan pengetahuan umum, meskipun sering terganggu oleh situasi

³⁴ Hanif.

perang. Di sisi lain, ia menjelma menjadi basis pergerakan sosial-politik dan militer, melalui keterlibatan guru serta muridnya dalam pembentukan barisan Hizbullah dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pasang surut jumlah murid serta vakumnya kegiatan belajar-mengajar pada 1947–1949 adalah cerminan nyata betapa kondisi revolusi turut memengaruhi stabilitas pendidikan. Namun demikian, bertahannya sekolah ini hingga berhasil meluluskan kader pada 1950 menunjukkan ketangguhan Kuliyatul Mubalighien sebagai institusi pendidikan sekaligus pusat perlawanan umat Islam Minangkabau pada masa revolusi kemerdekaan.

6. Sekolah Guru Agama Atas (SGAA)

Memasuki tahun 1950, situasi pendidikan di Padang Panjang mulai berangsur pulih setelah pergolakan revolusi fisik. Kuliyatul Mubalighin yang sempat berpindah-pindah demi keselamatan guru dan murid selama perang, akhirnya dapat kembali beraktivitas di Kauman. Pada bulan Maret 1950, suasana belajar mengajar kembali normal. Para murid dan guru yang semula menempati sekolah darurat di Nagari Sumanik, Tanah Datar, dijemput secara resmi dengan mobil dinas atas instruksi Kepala Jawatan Sosial Sumatra Tengah, Malik Ahmad. Upaya pemulangan ini dipimpin langsung oleh Harun el-Maany, menandai titik awal kebangkitan kembali lembaga pendidikan Muhammadiyah setelah fase berat revolusi.

Tak lama kemudian, pada Mei 1951, Majelis Pengajaran Daerah Sumatra Tengah mengadakan sebuah konferensi di Padang Panjang yang membahas persoalan krusial dalam dunia pendidikan. Salah satu yang paling mendesak adalah penyesuaian dengan kebijakan nasional terkait ujian negara yang ditetapkan oleh

Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Bahder Djohan. Keputusan itu mengharuskan sekolah-sekolah swasta untuk melakukan penyetaraan dengan sekolah negeri, khususnya Sekolah Guru Agama Negeri (SGAN). Dalam konferensi tersebut, diputuskan bahwa Kuliyatul Mubalighin/Muballighat diubah namanya menjadi Sekolah Guru Agama Atas (SGAA), atau dalam istilah lain disebut juga Mu'allimin Ulya.³⁵

Perubahan nama ini tidak sekadar kosmetik, melainkan mencerminkan transformasi mendasar dalam kurikulum maupun orientasi kelembagaan. Untuk bidang pendidikan umum, SGAA Muhammadiyah merujuk pada kurikulum SGAN. Sementara itu, untuk pendidikan agama tetap mempertahankan tradisi intelektual yang diwariskan dari Kuliyatul Mubalighin. Kurikulum dibagi ke dalam tiga kelompok besar: (1) Agama Islam, meliputi Al-Qur'an, Hadis, Usul Fiqh, dan Fiqh; (2) Bahasa Arab, yang mencakup Al-Qawa'id, Al-Muthala'ah, dan Al-Balaghah; serta (3) Ilmu Umum, meliputi Pendidikan, Praktikum Mengajar, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Ilmu Pasti, Ilmu Kimia, Ilmu Ekonomi, Ilmu Alam, Sejarah, Tata Negara, Ilmu Bumi, Ilmu Hayat, Menggambar, dan Nizam. Selain itu, ditambahkan pula mata pelajaran sore berupa pendidikan jasmani dan seni suara, yang menunjukkan perhatian Muhammadiyah terhadap pembentukan jasmani dan estetika murid di samping kecerdasan intelektual dan religiusitas mereka.³⁶

³⁵ Niken Iaras Agustina, "Dinamika Politik Pendidikan Guru Agama Islam Pada Masa Orde Lama," *Pendidikan Agama Islam* 02 (2019): 375–389.

³⁶ Hanif, *Kuliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

Dengan sistem baru ini, murid-murid kelas tiga dapat mengikuti ujian negara, sehingga lulusan SGAA Muhammadiyah memiliki legitimasi akademik yang setara dengan sekolah negeri. Bahkan, jurusan Ilmu Pasti (IPA) memungkinkan murid-muridnya mengikuti ujian negara di sekolah menengah umum (SMA). Langkah ini merupakan bukti bahwa Muhammadiyah, melalui SGAA, berhasil menghubungkan pendidikan Islam modern dengan sistem pendidikan nasional, tanpa kehilangan jati dirinya.

Data mengenai jumlah lulusan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada 1952, SGAA Muhammadiyah meluluskan 43 orang; tahun 1953 meningkat menjadi 64 orang; dan tahun 1956 melonjak hingga 94 orang. Lonjakan ini terus berlanjut: pada tahun 1956–1958 saja, jumlah lulusan tercatat mencapai 368 orang, dengan rincian 144 orang (1956), 103 orang (1957), dan 121 orang (1958). Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa SGAA bukan hanya berhasil bertahan, tetapi juga berkembang pesat, terutama pada dekade 1950-an.³⁷

Fenomena meningkatnya jumlah lulusan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik saat itu. Menjelang Pemilu 1955, terlihat kecenderungan naiknya jumlah murid yang masuk SGAA Muhammadiyah. Pada 1954 jumlah murid mencapai 95 orang, dan menjelang pemilu meningkat menjadi 108 orang. Lonjakan ini ditengarai sebagai hasil dari keberhasilan alumni Kuliyatul Muballighien maupun SGAA yang telah menorehkan prestasi di berbagai bidang: ada yang mengabdikan diri di instansi pemerintah, menjadi pendidik, memimpin persyarikatan,

³⁷ Muballighien, “Buku-Baku (Stamboek) Sekolah Muhammadiyah.”

bahkan aktif di partai politik, khususnya Partai Masyumi. Kesuksesan alumni ini memberi legitimasi sosial sekaligus daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk memasukkan anak-anak mereka ke SGAA Muhammadiyah.

Lebih jauh lagi, kedekatan antara Muhammadiyah dan Masyumi juga mewarnai dinamika SGAA. Banyak guru yang terlibat dalam aktivitas politik Masyumi, terutama menjelang pemilu 1955. Kampanye Masyumi yang gencar di Sumatra Tengah ternyata membuahkan hasil besar, dengan partai ini keluar sebagai pemenang dengan 480.521 suara atau 49 persen dari total pemilih, unggul di tujuh kabupaten (kecuali Pasaman). Kemenangan politik ini tentu turut mengangkat citra Muhammadiyah dan lembaga pendidikannya, termasuk SGAA Padang Panjang.

Namun, dinamika pendidikan ini juga tidak bisa dilepaskan dari pergolakan politik lokal. Setelah proklamasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang pada Februari 1958, SGAA turut merasakan dampak ketegangan politik dan militer.³⁸ Walaupun pada awalnya Dewan Banteng di bawah Ahmad Husein menduga konflik akan bersifat “perang dingin” tanpa kontak senjata, kenyataannya pemerintah pusat menanggapi dengan operasi militer penuh. Situasi ini membuat aktivitas pendidikan kembali berada dalam bayang-bayang konflik. Meski demikian, sebelum pecahnya pergolakan PRRI, SGAA Muhammadiyah telah menorehkan pencapaian penting dengan melahirkan ratusan

³⁸ Bhaktiar, *Muhammadiyah Di Bawah Tekanan Politik, Studi Terhadap Implikasi Pemikiran Politik Islam Dan Pergolakan Politik Luar* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019): 19-22.

lulusan yang kelak memainkan peran besar di ranah pendidikan, sosial, dan politik.³⁹

Dengan demikian, transformasi dari Kuliyatul Muballighien menjadi SGAA Muhammadiyah menandai fase penting dalam sejarah pendidikan Islam modern di Sumatra Barat. Lembaga ini bukan hanya sekadar sekolah, melainkan simbol keberhasilan Muhammadiyah dalam memadukan pendidikan agama, ilmu pengetahuan umum, dan orientasi kebangsaan dalam satu sistem. Di satu sisi, ia menyerap tuntutan penyetaraan dari pemerintah; di sisi lain, ia tetap mempertahankan ciri khas kaderisasi ulama-intelektual Muhammadiyah. Perjalanan SGAA hingga menjelang pergolakan PRRI menunjukkan bahwa Muhammadiyah berhasil menjadikan pendidikan sebagai pusat lahirnya kader bangsa, yang siap berjuang di jalur dakwah, pendidikan, maupun politik.

B. Kondisi dan Tantangan SGAA Pada Masa Pergolakan Daerah

1. Situasi Politik di Padang Panjang pada Masa Pergolakan Daerah

Dekade 1950-an merupakan masa paling dinamis dalam sejarah politik Indonesia modern. Setelah kemerdekaan 1945 dan pergolakan revolusi fisik usai, Indonesia memasuki periode demokrasi parlementer (1950–1959) yang diwarnai ketegangan politik, krisis ekonomi, dan ketidakpastian arah pembangunan. Dalam masa ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mulai menunjukkan gejala

³⁹ Hanif, *Kuliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

retak. Berbagai daerah di luar Jawa, termasuk Sumatera Barat, merasa dianaktirikan oleh kebijakan ekonomi dan politik yang lebih berpihak pada Pulau Jawa.⁴⁰

Bagi masyarakat Minangkabau, khususnya kalangan ulama dan kaum terpelajar, munculnya ketidakadilan struktural tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam. Partai Masyumi, yang memiliki basis kuat di Sumatera Barat, menentang kebijakan Presiden Soekarno yang mulai berorientasi ke politik kiri dan mendekat ke PKI. Sikap ini membuat sebagian tokoh Masyumi dan militer di Sumatera Barat membentuk solidaritas daerah untuk menuntut reformasi politik nasional.

Ketegangan itu akhirnya memuncak dengan pembentukan Dewan Banteng di Padang pada 1956, yang kemudian berkembang menjadi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958. Proklamasi PRRI dilakukan oleh tokoh-tokoh sipil dan militer Sumatera Barat seperti Kolonel Ahmad Husein, Letkol Dahlan Djambek, dan Sjafruddin Prawiranegara.⁴¹ Mereka menuntut pemerintahan baru yang dianggap lebih adil terhadap daerah, meski tetap mengakui kesetiaan kepada Republik Indonesia.⁴²

⁴⁰ Dayani, Rohayati, and Sujana, "Pemberontakan PRRI Dan Permesta: Ketegangan Politik Di Awal Orde Lama (1957-1958): 441-454."

⁴¹ Joko Suryanto, "Pemberontakan PRRI Di Sumatera Barat Tahun 1958-1961," *Repository.Usd.Ac.Id*, 2021, 1–85.

⁴² Jaleswari Pramodhawardani Andi Widjajanto, "Diskursus Historis PRRI Permesta," LAB 45: Laboratorium Indonesia 2045, 2025, <https://www.lab45.id/detail/322/diskursus-historis-prri-permesta>.

Namun bagi pemerintah pusat di bawah Presiden Soekarno, tindakan ini dianggap sebagai pemberontakan. Maka, sejak Maret 1958 dilancarkanlah Operasi 17 Agustus, yakni operasi militer besar-besaran untuk menumpas PRRI. Ratusan pasukan dikerahkan ke Sumatera Barat, dan pertempuran terjadi di berbagai wilayah dari Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, hingga Lintau dan Solok. Dalam situasi genting ini, Padang Panjang menjadi salah satu wilayah strategis yang ikut terdampak langsung. Kota kecil yang berada di jalur Padang–Bukittinggi ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung logistik, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pendidikan dan dakwah Islam modern, terutama melalui lembaga-lembaga Muhammadiyah. Kompleks Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, tempat berdirinya SGAA (Sekolah Guru Agama Atas), Mualimin, dan Asrama Aisyiyah, merupakan salah satu simpul penting pendidikan Islam di Sumatera Barat pada masa itu.⁴³

Ketika perang PRRI pecah, Padang Panjang tidak menjadi medan tempur utama, namun tidak pula lepas dari atmosfer politik yang panas dan tegang. Patroli pasukan pemerintah pusat kerap melewati kota ini karena posisinya yang strategis di tengah jalur transportasi antar-kota. Menurut keterangan pelaku sejarah, suasana kota terasa mencekam setiap malam terdengar suara tembakan, patroli militer, dan sweeping terhadap warga yang dicurigai mendukung PRRI.

Meskipun begitu, dibandingkan dengan daerah lain seperti Padang dan Payakumbuh, Padang Panjang tergolong lebih aman. Daerah yang paling

⁴³ Aminah Thaib, “Wawancara Keadaan Padang Panjang Dan Kauman Pada Masa PRRI, Tanggal 19-10-2025” (Padang Panjang, 2025).

terdampak adalah Kelurahan Kampung Manggis, sedangkan kawasan Tanah Pak Lambiak, tempat berdirinya kompleks Muhammadiyah Kauman, relatif tidak mengalami bentrokan langsung. Namun, keberadaan pasukan bersenjata di sekitar sekolah membuat aktivitas masyarakat berjalan dalam kewaspadaan tinggi.⁴⁴

Di tengah ketegangan politik tersebut, terjadi pula perpecahan sosial dan ideologis di tubuh masyarakat Minangkabau sendiri. Sebagian warga mendukung PRRI sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan pusat, sedangkan sebagian lain memilih netral atau berpihak pada pemerintah. Perpecahan ini turut memengaruhi suasana keagamaan dan pendidikan. Banyak tokoh agama dan guru Muhammadiyah yang dituding terlibat dalam PRRI, sementara yang lain memilih menghindar atau kembali ke kampung halaman.

Dalam konteks politik lokal, pemerintahan sipil di Padang Panjang praktis lumpuh. Fungsi administratif dijalankan oleh unsur militer, sementara kegiatan organisasi masyarakat termasuk Muhammadiyah dibatasi. Hal ini membuat lembaga pendidikan Islam modern mengalami tekanan berat, baik secara moral maupun operasional. Keadaan menjadi semakin sulit karena sebagian besar guru dan murid SGAA berasal dari luar daerah dari Riau, Aceh, hingga Sumatera Utara yang akhirnya terpaksa pulang akibat kondisi keamanan tidak stabil.⁴⁵

Namun, di tengah kekacauan itu, Padang Panjang menunjukkan ciri khas masyarakat Minangkabau yang resilien. Meskipun aktivitas organisasi terhenti,

⁴⁴ Thaib.

⁴⁵ Thaib.

masyarakat tetap menjaga norma sosial dan nilai keagamaan. Masjid dan surau masih menjadi pusat perlindungan, tempat mencari ketenangan di tengah ketakutan perang. Kauman Muhammadiyah sendiri, meski dalam pengawasan ketat, masih menjadi tempat berlindung bagi sebagian guru dan keluarga murid yang tidak bisa pulang.

Dengan demikian, situasi politik pada masa pergolakan daerah di Padang Panjang bukan sekadar konflik bersenjata, tetapi juga konflik ideologis dan psikologis yang mengguncang sendi kehidupan masyarakat. Ketegangan antara pusat dan daerah menjalar hingga ke ruang-ruang pendidikan, membuat sekolah-sekolah Islam modern seperti SGAA berada dalam posisi sulit: di antara idealisme dakwah dan realitas politik yang penuh risiko.

2. Dampak Pergolakan terhadap Kegiatan Belajar-Mengajar di SGAA Kauman Muhammadiyah Padang Panjang

Pergolakan politik yang meletus pada akhir 1950-an memberikan dampak multidimensional terhadap kehidupan sipil di Sumatera Barat.⁴⁶ Di ranah pendidikan, dampak tersebut menjadi sangat nyata pada lembaga-lembaga yang bersifat transregional dan bergantung pada mobilitas murid serta tenaga pengajar seperti SGAA (Sekolah Guru Agama Atas) Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Peristiwa PRRI dan operasi militer yang mengikutinya menimbulkan perubahan operasional yang fundamental: dari keberlangsungan normal

⁴⁶ Maulida, "Hitam Putih Prri-Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956-1961. (Jakarta: *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 2018): 174"

pembelajaran menjadi penghentian sementara, perpindahan personel, dan kerusakan fasilitas intelektual.

Pertama, keputusan penghentian sekolah adalah langkah manajerial yang reflektif terhadap situasi darurat. Berdasarkan keterangan pelaku sejarah yang diwawancarai, penghentian kegiatan belajar-mengajar di SGAA diinisiasi langsung oleh Direktur, Harum El Maany, beberapa hari menjelang proklamasi PRRI.⁴⁷ Keputusan ini bukan semata keputusan administratif; ia merupakan respons atas kombinasi dua kondisi yang mendesak: ancaman keamanan yang menggantung dan demografi siswa SGAA yang sebagian besar berasal dari luar kota. Dalam kondisi ketika keluarga dan kampung halaman belum aman, memulangkan siswa adalah tindakan perlindungan. Langkah tersebut juga mencerminkan batas pragmatis akuntabilitas pendidikan: tanpa kehadiran murid, operasi akademik formal tidak dapat dijalankan secara bermakna.

Kedua, karakter transregional peserta didik SGAA membuatnya lebih rentan ketimbang lembaga pendidikan yang bersandar pada populasi lokal. Lulusan dan calon guru yang dididik di SGAA datang dari berbagai kabupaten sebuah kekuatan bagi penyebaran jaringan Muhammadiyah tetapi sekaligus kelemahan saat konflik. Ketika keamanan memburuk, keluarga di daerah asal menuntut agar anak-anaknya pulang. Pihak sekolah, menghadapi dilema etis dan pragmatis, memilih pemulangan massal. Konsekuensinya, struktur kelas runtuh karena

⁴⁷ Hanif, *Kulliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

penarikan peserta didik dalam jumlah besar, kelas kosong, praktikum terhenti, dan program pengajaran yang bersifat berjenjang tidak dapat berlangsung.⁴⁸

Ketiga, gangguan tenaga pendidik memperburuk status operasional. Banyak guru SGAA yang berasal dari luar Sumatera Barat atau memiliki jejaring yang menjangkau daerah lain memilih kembali ke kampung halaman, turut serta dalam kegiatan sipil atau militer setempat, atau bergabung dengan gerilya PRRI.⁴⁹ Ketiadaan pengajar menghasilkan dua efek langsung: hilangnya kontinuitas pedagogis dan melemahnya institusi sebagai pusat reproduksi ilmu. Di lapangan, hanya sedikit pengajar yang bertahan catatan wawancara menyebutkan bahwa secara praktis yang bertahan hanya Direktur Harum El Maany. Keberadaan satu figur pemimpin penting secara simbolis membantu menjaga klaim institusional, tetapi tidak mencukupi untuk memulihkan kegiatan pembelajaran yang utuh.⁵⁰

Keempat, dampak terhadap fasilitas fisik dan sumber belajar bersifat destruktif dan seringkali permanen. Perpustakaan SGAA, yang sebelumnya menyimpan koleksi lokal dan beberapa bahan langka, hampir lumpuh dan sedikit koleksi yang tersisa, sisanya didapati rusak parah dibakar, dirobek, atau hancur. Kehancuran koleksi bukan sekadar kerugian material; ia merupakan hilangnya modal kultural dan intelektual yang sejak lama menjadi sumber rujukan guru dan murid. Kerusakan serupa pada arsip sekolah, surat-surat penting, atau perlengkapan

⁴⁸ Thaib, "Wawancara Keadaan Padang Panjang Dan Kauman Pada Masa PRRI, Tanggal 19-10-2025."

⁴⁹ Hanif, *Kulliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

⁵⁰ Hanif.

laboratorium menghambat proses rekonstruksi pasca konflik, karena dokumen-dokumen itu biasa menjadi landasan administratif dan bukti kepemilikan lembaga.⁵¹

Kelima, pola operasional alternatif bersifat heterogen dan tidak selalu terstruktur. Pada beberapa institusi di kompleks Kauman yang komposisi muridnya lebih lokal misalnya Mualimin kegiatan belajar masih dapat berlangsung, meski terbatas. Asrama Putri ‘Aisyiyah disebut tetap berjalan dan tidak diganggu oleh pasukan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pergolakan bersifat selektif: faktor asal-usul siswa, kedekatan sosial dengan komunitas setempat, dan persepsi keamanan memainkan peran penting. Sementara Mualimin mampu bertahan karena basis siswanya lokal, SGAA tidak memiliki keunggulan tersebut sehingga lebih cepat lumpuh ketika ketidakpastian melanda.

Keenam, implikasi psikososial terhadap komunitas pendidikan tidak dapat diabaikan. Penghentian aktivitas sekolah dan keterlibatan sebagian anggota persyarikatan dalam dinamika bersenjata menimbulkan rasa malu, trauma, dan stigma yang bertahan setelah fase aktif pertempuran mereda. Efek ini terlihat pada lambatnya reaktivasi kegiatan amal usaha Muhammadiyah setempat hingga awal 1960-an. Rasa malu kolektif ini berimplikasi pada reputasi lembaga: orang tua ragu mengirimkan anak kembali, donor potensial menahan bantuan, dan kader muda

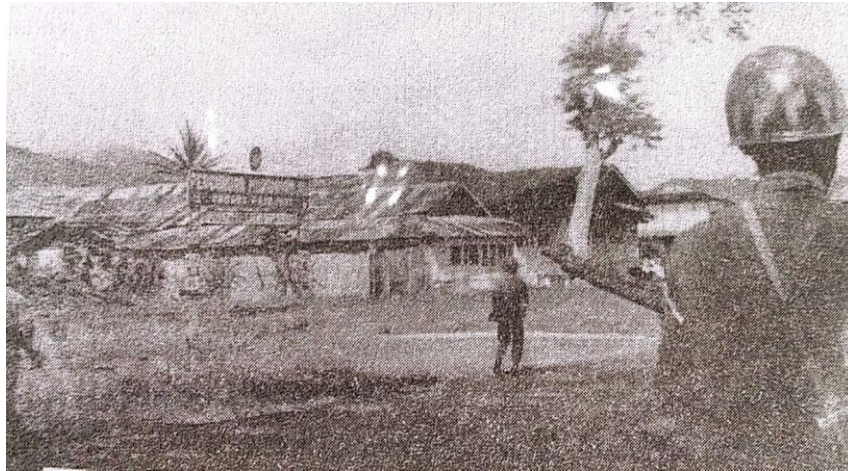
⁵¹ Thaib, “Wawancara Keadaan Padang Panjang Dan Kauman Pada Masa PRRI, Tanggal 19-10-2025.”

butuh proses pembinaan moral sebelum siap mengambil peran dalam pendidikan kembali.

Ketujuh, intervensi administratif dan organisasi Muhammadiyah selama masa krisis terasa terfragmentasi. Struktur PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Pabasko dilaporkan sempat mengalami kelumpuhan fungsi banyak amal usaha tidak berjalan. Namun, struktur informal dan jejaring lokal memainkan peran penting dalam menjaga sisa aktivitas sosial-keagamaan: pengajian kecil, bantuan kemanusiaan, dan pemeliharaan asrama tertentu tetap berlangsung meskipun dalam kapasitas minimal. Hal ini menunjukkan kemampuan organisasi sosial-keagamaan untuk menopang hidup komunitas meski institusi pendidikan formal terpukul.⁵²

Terakhir, penghentian dan gangguan itu tidak hanya bersifat jangka pendek. Dampak jangka menengah dan panjang terlihat pada proses rekrutmen, kualitas lulusan, dan kelangsungan program kaderisasi Muhammadiyah. Keterputusan pengalaman belajar (lost cohort) memengaruhi suplai guru terlatih di tahun-tahun berikutnya, sementara kekosongan dokumen dan bahan ajar mempersulit restorasi kurikulum. Memperbaiki kondisi bukan hanya soal membangun kembali gedung, melainkan pula rekonstitusi modal sosial, pembenahan kurikulum, dan pemulihan reputasi kelembagaan.

⁵² Hanif, *Kulliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.



Gambar 3 Tentara APRI dari Divisi Diponegoro sedang berpatroli di depan Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, Sumber: Buku Kuliyatul Muballighien dari Kauman untuk Indonesia

3. Peranan SGAA Selama Masa Pergolakan Daerah

Hampir seluruh amal usaha Muhammadiyah di Padang Panjang “mandek total” ketika pergolakan daerah memuncak. Aktivitas sekolah-sekolah Muhammadiyah, termasuk SGAA, terhenti karena mayoritas siswanya berasal dari luar daerah yang tidak dapat lagi kembali ke Padang Panjang akibat situasi keamanan yang tidak memungkinkan. Berbeda dengan Madrasah Mualimin yang masih dapat berjalan karena sebagian besar muridnya adalah warga lokal.⁵³ SGAA terpaksa menghentikan seluruh kegiatan belajar mengajar menjelang lima hari proklamasi PRRI.

Keputusan penghentian itu diambil langsung oleh Harum El Maany, Direktur SGAA sekaligus Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Padang

⁵³ Thaib, “Wawancara Keadaan Padang Panjang Dan Kauman Pada Masa PRRI, Tanggal 19-10-2025.”

Panjang–Batipuh–X Koto (Pabasko). Dalam kondisi genting menjelang pecahnya pertempuran, ia memutuskan untuk memulangkan para siswa dan guru ke kampung halaman masing-masing. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan civitas sekolah di tengah ketidakpastian politik dan militer. Meski demikian, Harum El Maany memilih untuk tetap bertahan di Padang Panjang. Keberadaannya di tengah situasi krisis menjadi simbol keteguhan kepemimpinan Muhammadiyah yang berusaha menjaga eksistensi lembaga dan aset organisasi.⁵⁴

Pada masa-masa itu, banyak guru dan tokoh Muhammadiyah lainnya yang harus meninggalkan kota karena alasan keamanan. Sebagian dari mereka yang berasal dari wilayah Sumatera Barat memilih bergabung dengan barisan PRRI, sementara yang lain menyingkir ke daerah-daerah yang dianggap lebih aman. Akibatnya, kegiatan dakwah dan pendidikan Muhammadiyah lumpuh di banyak tempat. Hanya segelintir tokoh, seperti Harum El Maany, yang berupaya menjaga agar semangat persyarikatan tidak padam sepenuhnya.⁵⁵

Salah satu bentuk nyata perjuangan Muhammadiyah di masa pergolakan adalah upaya penyelamatan aset-aset organisasi. Harum El Maany bersama Rasyid Idris Dt. Sinaro Panjang, selaku administrator Kauman Muhammadiyah, mengambil langkah berani untuk mengamankan dokumen-dokumen penting seperti surat tanah, akta notaris, dan berkas kepemilikan sekolah. Dokumen-dokumen

⁵⁴ Hanif, *Kulliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

⁵⁵ Thaib, “Wawancara Keadaan Padang Panjang Dan Kauman Pada Masa PRRI, Tanggal 19-10-2025.”

tersebut diserahkan kepada Pemuda Muhammadiyah, yang dengan penuh risiko membawa dan menyimpannya di luar kota hingga situasi mereda. Upaya penyelamatan ini bukan hanya mencerminkan kehati-hatian administratif, tetapi juga semangat menjaga kesinambungan perjuangan Muhammadiyah agar tidak hilang ditelan konflik.⁵⁶ Meski sebagian besar sekolah berhenti beroperasi, aktivitas sosial dan keagamaan Muhammadiyah tetap berdenyut dalam skala kecil. Asrama Putri Aisyiyah misalnya, masih bertahan dan tidak diganggu oleh tentara pusat.⁵⁷

Namun, pergolakan tersebut meninggalkan luka mendalam bagi warga persyarikatan. Menurut kesaksian Ibu Aminah, pasca-peristiwa PRRI masyarakat Muhammadiyah di Padang Panjang diliputi rasa malu dan trauma mendalam. Banyak dari mereka kehilangan keyakinan untuk kembali menggerakkan organisasi. Melihat keadaan itu, Harum El Maany dan Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah (MPPM) berinisiatif membangkitkan kembali semangat kader muda. Mereka menyerukan kepada Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah untuk bangkit dari keterpurukan dan melanjutkan cita-cita dakwah persyarikatan.⁵⁸

Gerakan penyadaran itu menjadi titik balik penting bagi kebangkitan Muhammadiyah di Padang Panjang setelah masa pergolakan. Dukungan moral dan finansial mulai berdatangan dari tokoh-tokoh masyarakat, seperti Pakih Muin dan

⁵⁶ Hanif, *Kulliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

⁵⁷ Thaib, "Wawancara Keadaan Padang Panjang Dan Kauman Pada Masa PRRI, Tanggal 19-10-2025."

⁵⁸ Hanif, *Kulliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

Hasan Rasjid, yang menjadi donatur pertama dalam proses pemulihan Kauman. Dari sinilah proses rekonstruksi amal usaha Muhammadiyah, termasuk SGAA, mulai dirintis kembali. Upaya tersebut menandai transisi penting dari masa keterpurukan menuju masa pemulihan, yang kelak membuka jalan bagi berdirinya kembali lembaga pendidikan Islam di bawah nama Kuliyatul Mubalighin.

C. Upaya SGAA dalam menghadapi tantangan pasca pergolakan daerah.

1. Kondisi SGAA Pasca Pergolakan Daerah

Peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) meninggalkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam bagi masyarakat Sumatera Barat, termasuk bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah di Padang Panjang. Kekalahan PRRI bukan hanya menandai berakhirnya sebuah perlawanan politik dan militer, namun juga menciptakan trauma kolektif yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Bagi warga Muhammadiyah, kekalahan tersebut menghadirkan perasaan malu dan keterpurukan moral yang berlangsung cukup lama, terutama di kalangan tokoh-tokoh persyarikatan yang sempat bersinggungan dengan aktivitas PRRI.⁵⁹

Perasaan ini begitu kuat hingga tahun 1962, di mana sebagian besar anggota Muhammadiyah di Padang Panjang memilih untuk menutup diri dari aktivitas organisasi. Dalam situasi demikian, kegiatan pendidikan yang sebelumnya dikelola Muhammadiyah, termasuk Sekolah Guru Agama Atas (SGAA) di Kauman Padang Panjang, mengalami kelumpuhan total. Bangunan sekolah banyak yang rusak

⁵⁹ Hanif.

akibat perang, sementara para guru dan murid tersebar ke berbagai daerah demi menyelamatkan diri. Sebagian arsip penting seperti surat tanah, akta notaris, dan dokumen kelembagaan pun disembunyikan atau dibawa keluar kota untuk menghindari perampasan oleh pihak militer.⁶⁰

Pasca perang, semangat untuk memulihkan lembaga pendidikan ini sempat tersendat karena ketiadaan dana dan rasa takut akan stigma politik terhadap Muhammadiyah. Namun, benih-benih kebangkitan mulai muncul ketika sejumlah tokoh seperti Harum El Maany, selaku Ketua Muhammadiyah Daerah, bersama dengan pengurus Majelis Pendidikan dan Pengajaran, Iskandar Zulkarnaini dan Djawarnis Sjarif, mulai menginisiasi gerakan penyadaran di kalangan warga persyarikatan. Mereka berupaya membangkitkan kembali semangat berorganisasi melalui kerja sama dengan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), Pemuda Muhammadiyah, serta Nasyiatul Aisyiyah untuk melupakan trauma masa lalu dan menghidupkan kembali kegiatan dakwah dan pendidikan.⁶¹

Titik balik kebangkitan Muhammadiyah di Kauman Padang Panjang mulai terlihat ketika pada pertengahan tahun 1962, Pakih Muin dan Chaidir Said, yang merupakan bagian dari unsur Pemuda Muhammadiyah, melakukan perjalanan menuju Sungai Batang untuk menemui Rasjid Idris Dt. Sinaro Panjang, administrator Muhammadiyah Padang Panjang. Dalam pertemuan itu, mereka meminta izin untuk mengambil kembali seluruh berkas penting milik Muhammadiyah yang sebelumnya diselamatkan oleh Dt. Sinaro Panjang saat

⁶⁰ Hanif.

⁶¹ Hanif.

peristiwa PRRI berlangsung. Setelah diserahkan, dokumen tersebut kemudian dibawa kembali ke Padang Panjang dan diserahkan kepada Harum El Maany untuk menjadi dasar restorasi administrasi dan hukum Muhammadiyah.⁶²



Gambar 4 Rasjid Idris Dt. Sinaro Panjang, sang administrator Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, Sumber Buku Kuliyatul Mubalighien dari Kauman untuk Indonesia

Dengan berbekal dokumen tersebut, Muhammadiyah mulai menata ulang kelembagaan dan mempersiapkan pemulihan sekolah-sekolahnya. Dalam konteks ini, peran Pakih Muin dan Hasan Rasjid sangat menonjol. Keduanya tercatat sebagai donatur utama yang menggelontorkan dana dalam jumlah besar demi restorasi bangunan sekolah di Kauman, termasuk SGAA. Bantuan mereka menjadi simbol nyata dari kebangkitan semangat persyarikatan setelah masa kelam

⁶² Thaib, “Wawancara Keadaan Padang Panjang Dan Kauman Pada Masa PRRI, Tanggal 19-10-2025.”

pergolakan. Perlahan, rasa percaya diri warga Muhammadiyah mulai pulih. Upaya-upaya pemulihan pun mulai diarahkan tidak hanya pada aspek fisik bangunan sekolah, tetapi juga pada pembenahan sistem administrasi dan jaringan sosial antaranggota. Gerakan ini menjadi fondasi penting bagi langkah berikutnya, yaitu upaya menghidupkan kembali aktivitas pendidikan secara resmi di Kauman Padang Panjang.⁶³

2. Kembalinya SGAA Menjadi Kulliyatul Muballighien

Pasca berakhirnya pergolakan daerah (PRRI), kegiatan pendidikan dan keagamaan di lingkungan Muhammadiyah Padang Panjang mengalami kemunduran yang cukup lama. Peristiwa politik dan sosial tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik pada bangunan, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi warga persyarikatan Muhammadiyah. Menurut keterangan informan lapangan, perasaan malu dan segan untuk kembali aktif di Muhammadiyah masih terasa kuat hingga sekitar tahun 1962.⁶⁴

Dalam situasi tersebut, Harum El Maany selaku Ketua Muhammadiyah Daerah Padang Panjang sekaligus mantan Direktur SGAA, berinisiatif memulihkan semangat warga dan menghidupkan kembali kegiatan pendidikan Muhammadiyah. Bersama Majelis Pendidikan dan Pengajaran yang dipimpin oleh Iskandar Zulkarnaini dan Djawarnis Sjarif, beliau mengajak Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) yang terdiri dari Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul

⁶³ Hanif, *Kulliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

⁶⁴ Thaib, "Wawancara Keadaan Padang Panjang Dan Kauman Pada Masa PRRI, Tanggal 19-10-2025."

Aisyiyah untuk melakukan gerakan penyadaran. Tujuannya adalah agar warga Muhammadiyah melupakan trauma akibat PRRI dan kembali aktif menjalankan amal usaha persyarikatan, termasuk bidang pendidikan.⁶⁵

Gerakan ini mulai menunjukkan hasilnya pada pertengahan tahun 1962, ketika beberapa tokoh muda Muhammadiyah seperti Pakih Muin dan Chaidir Said, bersama rekan-rekan lainnya, bergerak menuju Sungai Batang, Maninjau untuk menemui Rasyid Idris Dt. Sinaro Panjang, selaku administrator Muhammadiyah Padang Panjang. Tujuan mereka adalah untuk meminta kembali dokumen-dokumen penting milik Muhammadiyah yang sempat diamankan pada masa pergolakan. Dokumen tersebut meliputi surat tanah, akta notaris, serta arsip-arsip berharga lainnya. Setelah diserahkan oleh Dt. Sinaro Panjang, seluruh berkas tersebut kemudian dikembalikan kepada Harum El Maany selaku Ketua PDM Padang Panjang untuk dijadikan dasar pemulihan kegiatan organisasi dan pendidikan.⁶⁶

Pada masa yang sama, dukungan finansial mulai mengalir dari tokoh-tokoh Muhammadiyah setempat. Pakih Muin dan Hasan Rasjid tercatat sebagai dua donatur pertama yang memberikan bantuan dana dalam jumlah besar untuk memulihkan kembali bangunan sekolah di kompleks Kauman, termasuk SGAA. Bantuan ini menjadi titik awal kebangkitan aktivitas pendidikan di Kauman Padang Panjang.⁶⁷ Langkah-langkah pemulihan tersebut mendapatkan legitimasi yang lebih

⁶⁵ Hanif, *Kulliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.

⁶⁶ Hanif.

⁶⁷ Hanif.

kuat setelah diadakannya Konferensi Muhammadiyah Daerah Sumatera Barat pada tanggal 25–28 Agustus 1963 di Kota Padang. Dalam sidang Komisi Pendidikan, disepakati beberapa keputusan penting.⁶⁸, di antaranya:

- a. Memulihkan seluruh sekolah Muhammadiyah di Padang Panjang, termasuk SGAA;
- b. Mengaktifkan kembali guru-guru yang sempat terdampak peristiwa PRRI;
- c. Mengubah nama SGAA menjadi Kulliyatul Muballighi

Keputusan tersebut segera dilaksanakan oleh pengurus Muhammadiyah Padang Panjang. Pada Agustus 1964, Kulliyatul Muballighien resmi dibuka kembali dan memulai kegiatan belajar-mengajar dengan dua kelas awal. Kelas I berjumlah tujuh murid, sedangkan kelas II terdiri dari dua belas murid. Jumlah ini memang masih sangat sedikit dibandingkan masa kejayaan SGAA sebelum PRRI, namun menandai awal kebangkitan pendidikan Islam modern di Kauman.⁶⁹

Meskipun kondisi sarana prasarana masih terbatas dan gedung sekolah belum sepenuhnya pulih, semangat belajar para siswa dan pengabdian guru tetap tinggi. Aktivitas pendidikan kembali berjalan dengan dukungan masyarakat sekitar dan semangat persyarikatan yang perlahan tumbuh kembali. Transformasi SGAA menjadi Kulliyatul Muballighien juga membawa perubahan penting dalam orientasi

⁶⁸ Hanif.

⁶⁹ Azizah, *Dinamika Madrasah Aliyah Kulliyatul Muballighien Muhammadiyah Padang Panjang (Tinjauan Historis 1930-2018)*. (Padang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 20190): 48-51.

pendidikan Muhammadiyah. Bila sebelumnya SGAA berfokus pada pendidikan guru agama, maka Kuliyatul Mubalighin diarahkan untuk mencetak kader mubaligh dan pendidik Islam yang mampu berdakwah secara luas di tengah masyarakat. Perubahan ini mencerminkan semangat pembaruan Muhammadiyah pasca-pergolakan: tidak hanya membangun fisik sekolah, tetapi juga memulihkan jati diri dan kepercayaan diri warga persyarikatan.⁷⁰

Dengan demikian, proses pemulihan dan transformasi SGAA menjadi Kuliyatul Muballighien bukan hanya sekadar pergantian nama lembaga, tetapi juga simbol dari kebangkitan kembali semangat pendidikan Islam modern di Padang Panjang setelah masa kelam PRRI. Melalui kerja keras tokoh-tokoh Muhammadiyah, dukungan masyarakat, serta tekad untuk bangkit, Kauman kembali menjadi pusat pendidikan dan dakwah Muhammadiyah di Minangkabau.

⁷⁰ Hanif, *Kuliyatul Muballighien: Dari Kauman Padang Panjang, Untuk Indonesia*.